

PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PARIWISATA
KOTA BATU



PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Dinas Pariwisata tahun 2018 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat RENJA, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batu Tahun 2018.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas Pariwisata Kota Batu dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2018, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam RENJA ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Selanjutnya kepada semua pihak khususnya pejabat struktural di lingkungan Dinas Pariwisata Kota Batu beserta jajarannya yang telah bekerja keras menyusun dokumen RENJA ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kota Batu yang lebih sejahtera dan berdaya saing.

Batu, 3 September 2018
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu



Drs. IMAM SURYONO, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630928 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB IPENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	11
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	Error! Bookmark not defined.
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	11
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	13
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	13
3.1.1. Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa.....	13
3.1.2. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Nasional.....	13
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	14
3.3. Program dan Kegiatan.....	14
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	16
BAB V PENUTUP	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batu tahun 2018 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018 ini menyusun Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2018. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2018, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang tertuang dalam Renja Kementerian Pariwisata dan Renja Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Timur yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Renja Dinas Pariwisata Kota Batu disusun berdasarkan Landasan Idiil Pancasila, UUD 45, serta Peraturan Perundang-undangan yang lain sebagai berikut :

1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
4. UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
5. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
6. UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata
7. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
8. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
9. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
10. PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
11. PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12. Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
13. Permenpar No. 29 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata tahun 2015 - 2019
14. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
15. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
16. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025
- 17.
18. Perda Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Jawa Timur tahun 2005-2025.
19. Perda Propinsi Jawa Timur No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur tahun 2014-2019
20. Perda Kota Batu No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Batu 2010-2030.
21. Perda Kota Batu No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Batu tahun 2005-2025.
22. Perda Kota Batu No 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batu tahun 2007-2012.
23. Peraturan Walikota Batu 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2018 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat perubahan program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pariwisata Kota Batu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2018.

Sedangkan tujuan disusunnya dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu tahun 2018 adalah :

1. Acuan Dinas Pariwisata dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Batu tahun 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Kota Batu.
2. Merumuskan program dan kegiatan kepariwisataan serta seni budaya di Kota Batu selama tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu Tahun 2018 terdiri dari 5 (lima) bab dan beberapa lampiran. Renja disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I LATAR BELAKANG

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Renstra. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal

Menyajikan tabel perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan

pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PARIWISATA

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Secara umum, seluruh target kinerja Dinas Pariwisata pada tahun 2017 telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator kinerja program pengembangan pemasaran pariwisata, yaitu cakupan wilayah pemasaran pariwisata, telah terealisasi 3 wilayah (lokal, nasional, internasional).

Untuk program pengembangan destinasi pariwisata, indikator kinerja “Persentase desa wisata dengan sarana prasarana yang memadai” pada tahun 2017 masih 0 (nol). Hal tersebut dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru dicantumkan pada dokumen Renstra Dinas Pariwisata tahun 2018-2022, dimana Dokumen Pengkriteriaan Desa Wisata yang menjadi dasar pengukuran indikator tersebut masih akan disusun pada tahun 2018.

Kemudian indikator kinerja yang kedua dalam program yang sama adalah “Persentase usaha pariwisata yang tersertifikasi” terealisasi sebesar 12,24% atau sebesar 12 usaha dari 98 usaha pariwisata yang ditargetkan.

Pada Program Pengembangan Kemitraan, terdapat 2 indikator kinerja. Indikator yang pertama adalah “Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi”, yang pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100% atau sejumlah 40 orang. Kemudian indikator kedua adalah “Jumlah kelompok pengelola desa wisata maju”, yang pada tahun 2017 masih 0 (nol) karena indikator ini merupakan indikator baru yang data awalnya masih belum tersedia.

Pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya, terdapat 3 indikator kinerja. Indikator pertama, “Persentase nilai tradisi budaya yang teraktualisasi”, pada tahun 2017 terealisasi sebesar 100% atau sebanyak 1 event. Indikator kedua, “Persentase benda, situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan”, pada tahun 2017 terealisasi 11,63% atau sejumlah 10 unit benda, situs dan kawasan cagar budaya yang pernah dilestarikan dari total 86 unit yang ada. Dan terakhir, indikator “Persentase kesenian yang teraktualisasikan”, terealisasi sebesar 100% pada tahun 2017 melalui penyelenggaraan event-event seni budaya dan pengiriman misi-misi kebudayaan ke luar daerah.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Kota Batu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Kota Batu

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target dan Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
3	URUSAN PILIHAN												
3	02	BIDANG URUSAN PARIWISATA											
3	02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja kepada aparatur internal dinas (%)	100	100	100	100	100	300	75,00		
3	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah anggota panitia pelaksana kegiatan (orang)	21	14	21	21	100	21	56	14,00
					Jumlah anggota tim pengadaan barang dan jasa (orang)	10	11	10	10	100	10	31	7,75
					Jumlah pegawai non PNS (orang)	9	16	9	9	100	9	34	8,50
					Jumlah materai (paket)	1	1	1	1	100	1	3	0,75
3	02	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah aset dinas yang dipelihara (unit)	37	32	41	41	100	37	110	27,50
3	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pemenuhan alat tulis kantor (bulan)	12	0	0	0	0	12	12	3,00
3	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan (bulan)	12	12	12	12	100	12	36	9,00

3	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi kantor (bulan)	12	0	0	0	0	12	12	3,00
3	02	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga dinas (bulan)	12	12	12	12	100	12	36	9,00
3	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dinas (media cetak)	3	2	3	3	100	3	8	2,00
3	02	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan bahan logistik penunjang kegiatan dinas (bulan)	12	0	12	12	100	12	24	6,00
3	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan makanan minuman dinas (bulan)	12	0	0	0	0	12	12	3,00
3	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah fasilitasi perjalanan dinas (bulan)	300	155	210	189	90	300	644	161,00
3	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat fasilitas komputer yang layak (%)	45,71	40	40	40	100	45,71	126	31,43
3	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	7	3	10	10	100	7	20	5,00
3	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	1	0	2	2	100	1	3	0,75
3	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	14	0	0	0	0	14	14	3,50
3	02	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	1	1	1	1	100	1	3	0,75
3	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur dinas yang mendapat sertifikat (orang)	5	0	0	0	0	5	5	1,25
3	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas pegawai dinas (orang/hari)	405	200	200	149	75	405	754	188,50
3	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas (%)	100,00	0	100,00	0	0	100,00	100	25,00
3	02	06	05	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Jumlah dokumen Renstra yang terbentuk (dokumen)	1	0	1	0	0	1	1	0,25
3	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan wilayah pemasaran wisatawan nusantara	3	0	3	3	100	3	6	1,50

3	02	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Jumlah event promosi luar daerah (event)	3	0	5	5	100	3	8	2,00
3	02	15	09	Promosi Pariwisata Kota Batu	Jumlah media promosi pariwisata (media)	3	1	3	3	100	3	7	1,75
3	02	15	10	Promosi Pariwisata Agenda Tahunan	Jumlah event wisata tematik yang diagendakan tahunan (event)	3	20	6	3	50	3	26	6,50
3	02	15	xx	Pengembangan informasi dan analisa pasar pariwisata	Jumlah maintenance aplikasi untuk pengembangan kepariwisataan daerah (kali)	1	0	0	0	0	1	1	0,25
3	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan sarana prasarana penunjang daya tarik desa wisata maju (%)	1,23	0	0,00	0	0	1,23	1	0,31
					Persentase usaha pariwisata yang tersertifikasi (%)	15,31	0	0	0	0	15,31	15	3,83
3	02	16	01	Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	Jumlah DTW yang difasilitasi dalam Anugerah Wisata Jawa Timur (DTW)	3	1	3	3	100	3	7	1,75
3	02	16	04	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha	Jumlah fasilitasi kerjasama kemitraan desa wisata dengan lembaga/dunia usaha (kali)	4	1	2	1	50	4	6	1,50
3	02	16	05	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata	Persentase desa wisata yang memiliki dokumen kajian perencanaan dan pengembangan desa wisata (%)	35	0	0	0	0	35	35	8,75
3	02	16	07	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Swera Pengawasan Standarisasi	Jumlah peserta pembinaan teknis usaha jasa pariwisata (usaha jasa)	100	150	360	216	60	100	466	116,50
3	02	16	xx	Pengembangan Usaha Jasa dan Sarana Pariwisata	Jumlah buku data profil usaha pariwisata (buku)	1	0	0	0	0	1	1	0,25
3	02	17		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)	60		40		0	60	60	15,00
					Jumlah kelompok pengelola desa wisata maju (kelompok)	1	0	0	0	0	1	1	0,25
3	02	17	03	Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	Jumlah peserta pembinaan teknis kompetensi profesi SDM Pariwisata (orang)	60		75	75	100	60	135	33,75
3	02	17	04	Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	Jumlah lembaga pariwisata yang mendapat pembinaan (lembaga)	1		0	0	0	1	1	0,25

3	02	17	07	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah peserta pembinaan peningkatan peran serta masyarakat bidang pariwisata (orang)	70	0	100	100	100	70	170	42,50
2				URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									
2	16			BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN									
2	16	15		Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase nilai tradisi budaya yang teraktualisasi (%)	100	100	100	66,67	67	100	267	66,67
2	16	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah fasilitasi event nilai-nilai tradisional daerah (event)	3	1	3	2	67	3	6	1,50
2	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda, situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan (%)	12,79	1,16	11,63	11,63	100	12,79	26	6,40
2	16	16	18	Penggalan dan Penataan Benda Cagar Budaya	Jumlah situs, benda dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	11	1	1	1	100	11	13	3,25
2	16	17		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kesenian yang teraktualisasikan (%)	100	100	100	100	100	100	300	75,00
2	16	17	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah festival kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	9	18	13	11	85	9	38	9,50
2	16	17	04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah festival kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	1	0	1	1	100	1	2	0,50
2	16	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah festival kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	8	3	3	3	100	8	14	3,50
2	16	17	11	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Untuk Kegiatan Car Free Day	Jumlah festival kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	1	1	1	1	100	1	3	0,75
2	16	17	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Dalam Daerah	Jumlah festival kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	5	5	5	5	100	5	15	3,75

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, Gubernur, bupati/walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang kesenian sesuai dengan SPM Bidang Kesenian yang dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi, kabupaten/kota. Dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan bahwa target SPM adalah untuk tahun 2010-2014, namun indikator yang tercantum masih dianggap relevan sehingga masih digunakan oleh Dinas Pariwisata hingga tahun 2018.

Dalam peraturan menteri tersebut terdapat 7 indikator SPM yaitu : Cakupan Kajian Seni, Cakupan Fasilitas Seni, Cakupan Gelar Seni, Misi Kesenian, Cakupan Sumber Daya Manusia Kesenian, Cakupan Tempat Kesenian, dan Cakupan Organisasi Kesenian. Diantara ketujuh indikator tersebut, rata-rata realisasi Cakupan Kajian Seni dalam 5 tahun masih sebesar 31,8%. Jauh di bawah target yang ditentukan dalam peraturan menteri sebesar 53%.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, terdapat 3 Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditangani oleh Dinas Pariwisata, yaitu Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya, Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan, dan Jumlah kunjungan wisata (juta orang). Dimana capaian ketiga indikator tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Bahkan IKK Jumlah Kunjungan Wisata jauh melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 140% atau terealisasi sebesar 4,79 juta wisatawan dari target sebesar 3,41 juta wisatawan.

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata
Kota Batu

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				n-2	n-1	n	n+1	n-2	n-1	n	n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Cakupan Kajian Seni (%)	v		53	53	53	53	40	20	53	53	
2	Cakupan Fasilitas Seni (%)	v		43	43	43	43	57	43	43	43	
3	Cakupan gelar seni (%)	v		75	75	75	75	75	100	75	75	
4	Misi kesenian (%)	v		100	100	100	100	100	0	100	100	
5	Cakupan sumber daya manusia kesenian	v		25	25	25	25	38	25	25	25	
6	Cakupan tempat kesenian	v		100	100	100	100	50	50	50	50	
7	Cakupan organisasi kesenian	v		100	100	100	100	100	100	100	100	
8	Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		v	1	1	1	1	5	5	5	5	
9	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)		v	2	2	2	2	1	1	1	1	
10	Jumlah kunjungan wisata (juta orang)		v	3,22	3,41	5,26	5,79	3,97	4,79	5,26	5,79	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Secara umum, kinerja Dinas Pariwisata sangat baik, hal tersebut terlihat dari Jumlah Kunjungan Wisatawan yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Kurangnya dukungan kemampuan/keahlian sumber daya aparatur Dinas Pariwisata dalam menyelesaikan tugas pekerjaan.
2. Kurangnya etos kerja yang baik dari mayoritas sumber daya aparatur Dinas Pariwisata.
3. Adanya konflik pribadi dalam Dinas Pariwisata yang cenderung menghambat kinerja pelayanan Dinas Pariwisata.
4. Kurang valid dan terkininya data dan informasi yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata.
5. Kurangnya evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pariwisata.
6. Tidak lancarnya koordinasi antar SKPD.
7. Tidak lancarnya pembahasan-pembahasan dengan DPRD.
8. Kesulitan penetapan indikator kinerja yang baik, yang mungkin disebabkan adanya indikator tingkat nasional yang tidak dapat diterapkan di daerah.
9. Belum atau tidak ada dampak nyata peningkatan kemampuan sumber daya aparatur perencana dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan.
10. Benturan kepentingan dengan pihak ketiga yang terkena dampak dari implementasi RTRW.
11. Kesulitan dalam mempertahankan rencana tata ruang terkait dengan kawasan tertentu yang berstatus kepemilikan pribadi.
12. Kesulitan dalam menghadapi campur tangan pihak ketiga dalam pembahasan dan penetapan perencanaan tata ruang.
13. Belum sesuai Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan peraturan perundangan tentang KLHS.
14. Belum optimalnya pemanfaatan dokumen KLHS.
15. Terkesampingkannya pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
16. Kurangnya kontrol dan evaluasi terhadap pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis baik dalam proses maupun hasil kajiannya.

Permasalahan dan hambatan tersebut diatas, jika tidak segera ditangani, maka akan berakibat pada menurunnya kinerja perangkat daerah. Yang pada akhirnya akan berimbas pada pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Berdasarkan telaah visi misi Kepala Daerah, telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, serta telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka Dinas Pariwisata merumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Promosi pariwisata belum optimal dan masih parsial
2. Pengelolaan daya tarik dan usaha jasa pariwisata belum optimal
3. Rendahnya Peran serta masyarakat dalam peningkatan ekonomi sektor pariwisata
4. Rendahnya peran serta masyarakat dalam pelestarian budaya
5. Data dan informasi kepariwisataan belum terpadu
6. Ketersediaan produk hukum daerah terkait kepariwisataan belum optimal
7. Sarana prasarana pariwisata belum memadai

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil musrenbang tahun 2017, Dinas Pariwisata menampung 41 usulan dari desa/kelurahan. Sebanyak 34 usulan merupakan bantuan alat seni dan pelatihan, 4 usulan

penataan bangunan punden, 2 usulan pembangunan sarana prasarana pariwisata dan 1 usulan pemeliharaan. Usulan berupa bantuan hibah tersebut sebagian besar tidak dapat dipenuhi dikarenakan penerima bantuan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Permendagri No 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Kota Batu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program pengelolaan keragaman budaya				
1.1	Kegiatan Pelestarian kesenian daerah	Kota Batu	Jumlah Kelompok seni yang mendapat pembinaan (kelompok seni)	34 kelompok seni	Bantuan peralatan kesenian dan pelatihan (Usulan Musrenbang 2017 Desa/Kelurahan)
1.2	Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan Daerah	Kota Batu	Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	4 unit	Penataan bangunan punden (Usulan Musrenbang 2017 Desa/Kelurahan)
2	Program pengembangan Destinasi Pariwisata				
2.1	Pengembangan Objek & Daya Tarik Pariwisata	Kota Batu	Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terbangun (unit)	2 unit	Pembangunan rest area dan selfie area (Usulan Musrenbang 2017 Desa/Kelurahan)
			Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terpelihara (unit)	1 unit	Penataan area kolam water mbwol (Usulan Musrenbang 2017 Desa/Kelurahan)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pola pengembangan pariwisata 2015-2019 didasarkan atas paradigma berkelanjutan dan peningkatan daya saing, di dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan empat pilar kepariwisataan sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, perjalanan wisatawan nusantara, meningkatkan devisa pariwisata, meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata, meningkatkan investasi bidang pariwisata, dan meningkatkan citra pariwisata Indonesia di mata dunia. Sehingga tujuan dari pembangunan kepariwisataan sesuai dengan UU No. 10 tahun 2009 “Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

Untuk melaksanakan program-program pembangunan kepariwisataan sangat diperlukan adanya koordinasi lintas sektor yang efektif, termasuk koordinasi yang baik dengan daerah dan masyarakat karena pariwisata merupakan kegiatan yang multi sektor. Sektor ekonomi kreatif, merupakan sektor yang tidak bisa dipisahkan yang aktivitasnya saling berkaitan dengan pariwisata. Keberadaan sektor pariwisata akan menciptakan hubungan yang saling mendukung dan menguatkan (simbiosis mutualistik).

3.1.1. Undang-undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Pembangunan kepariwisataan Indonesia dilaksanakan berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisataan. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan ini meliputi: industri pariwisata; destinasi pariwisata; pemasaran; dan kelembagaan kepariwisataan.

3.1.2. Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Arah kebijakan dihubungkan dengan program pembangunan pariwisata yang digariskan dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), yang fokus pada program kegiatan pengembangan terhadap empat pilar pengembangan kepariwisataan, yaitu :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Menciptakan, meningkatkan kualitas produk & pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

2. Pengembangan Industri Pariwisata

Mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, & pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

3. Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

4. Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Mengembangkan organisasi kepariwisataan, SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan & penyelenggaraan kegiatan Kepariwisata di Destinasi Pariwisata.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam Ranwal RPJMD Kota Batu Tahun 2018-2022, tertuang tujuan no 3 yaitu “Memacu Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pengembangan Agrowisata, dan Kemandirian Produktivitas Desa”. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan ke sasaran, yang salah satunya berbunyi, “Meningkatnya Aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan”.

Berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kota sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pariwisata memfokuskan program dan kegiatannya pada pengembangan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata berbasis kearifan lokal. Untuk itu dirumuskan tujuan Dinas Pariwisata, **“Meningkatnya aktivitas perekonomian yang inklusif berkelanjutan pada sektor pariwisata”**. Tujuan tersebut untuk kemudian diturunkan dalam sasaran Dinas Pariwisata, **“Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal”**

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam merumuskan program dan kegiatan, secara umum Dinas Pariwisata berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Pariwisata yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Batu. Kemudian, untuk merumuskan kegiatan secara terperinci, Dinas Pariwisata mempertimbangkan faktor-faktor untuk mencapai indikator kinerja dalam rangka mencapai visi misi kepala daerah, hingga usulan dari masyarakat yang diperoleh melalui forum musrenbang.

Program dan Kegiatan pada 2018 :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - b. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - i. Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD
- 6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
 - a. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri
 - b. Promosi Pariwisata Kota Batu
 - c. Promosi Pariwisata Agenda Tahunan
 - d. Pengembangan informasi dan analisa pasar pariwisata
- 7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
 - a. Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha
 - c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata
 - d. Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Swera Pengawasan Standarisasi
 - e. Pengembangan Objek & Daya Tarik Pariwisata
- 8. Program Pengembangan Kemitraan
 - a. Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya
 - b. Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
 - c. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata
- 9. Program Pengembangan Nilai Budaya
 - a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
- 10. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - a. Penggalan dan Penataan Benda Cagar Budaya
- 11. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - a. Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
 - b. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah
 - c. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
 - d. Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Untuk Kegiatan Car Free Day
 - e. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Dalam Daerah
 - f. Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan Daerah
 - g. Kegiatan Pelestarian kesenian daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada tahun 2018, Dinas Pariwisata merencanakan 11 program dan 37 kegiatan dengan nilai pagu sebesar Rp. 9.819.066.700,- yang berasal dari APBD. Dengan rincian : 5 program 17 kegiatan untuk mendukung kegiatan rutin Dinas Pariwisata; 1 program 4 kegiatan untuk mendukung promosi dan pemasaran pariwisata baik ke dalam daerah maupun ke luar daerah; 1 program 5 kegiatan untuk mendukung pengembangan produk pariwisata, yang difokuskan pada pengembangan desa wisata; 1 program 3 kegiatan untuk mendukung pengembangan SDM Pariwisata yang difokuskan pada pengembangan ekonomi kreatif; dan 3 program 9 kegiatan untuk memajukan kebudayaan daerah lokal.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kota Batu

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2018				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Thn 2019			
			Lokasi	Capaian Target Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2											
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	16										
	KEBUDAYAAN										
2	16	15									
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase seni budaya yang teraktualisasi (%)		100%	285.020.000			-	-		
2	16	15	01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah fasilitasi event nilai-nilai tradisional daerah (event)	Kota Batu	3 event	285.020.000	APBD		-
2	16	16									
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs, dan kawasan budaya yang dilestarikan (%)		13%	114.293.000			-	-		
2	16	16	18	Penggalian dan Penataan Benda Cagar Budaya	Jumlah situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan (unit)	Kota Batu	11 unit	114.293.000	APBD		-
2	16	17									
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase seni budaya yang teraktualisasi (%)		100%	3.103.112.460			-	-		
2	16	17	01	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah event kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	Kota Batu	7 event	422.520.000	APBD		-
2	16	17	04	Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah	Jumlah fasilitasi kelompok seni (bulan)	Kota Batu	12 bulan	145.700.000	APBD		-
2	16	17	05	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Jumlah event kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	Luar Kota Batu	6 event	465.720.000	APBD		-
2	16	17	11	Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Untuk Kegiatan Car Free Day	Jumlah fasilitasi kelompok seni (bulan)	Kota Batu	8 bulan	194.955.960	APBD		-
2	16	17	12	Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Dalam Daerah	Jumlah event kesenian daerah yang diikuti dan dilaksanakan (event)	Kota Batu	8 event	1.617.790.000	APBD		-
2	16	17	xx	Kegiatan Pelestarian Sejarah dan Kepurbakalaan Daerah	Jumlah peserta bimtek pelestarian sejarah dan keurbakalaan (orang)	Kota Batu	100 orang	79.500.000	APBD		-
2	16	17	xx	Kegiatan Pelestarian kesenian daerah	Jumlah dokumen pokok pikiran kebudayaan yang tersusun (dokumen)	Kota Batu	1 dokumen	176.926.500	APBD		-
3											
	URUSAN PILIHAN										
3	02										
	PARIWISATA										

3	02	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan penunjang kinerja kepada aparatur internal dinas (%)		100%	972.293.240			100%	997.800.000
3	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah anggota panitia pelaksana kegiatan (orang)		20 orang	662.037.920			20 orang	728.200.000
					Jumlah anggota tim pengadaan barang dan jasa (orang)		10 orang				10 orang	
					Jumlah pegawai non PNS (orang)		16 orang				16 orang	
					Jumlah jam lembur (jam)		912 jam				912 jam	
					Jumlah materai (paket)		1 paket				1 paket	
3	02	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah aset dinas yang dipelihara (unit)	Dinas Pariwisata	37 unit	12.750.000	APBD		37 unit	14.000.000
3	02	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah pemenuhan alat tulis kantor (bulan)	Dinas Pariwisata	12 bulan	28.729.800	APBD		12 bulan	31.600.000
3	02	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan (bulan)	Dinas Pariwisata	12 bulan	29.287.800	APBD		12 bulan	46.000.000
3	02	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemenuhan kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan (bulan)	Dinas Pariwisata	12 bulan	2.514.600	APBD		12 bulan	2.800.000
3	02	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga dinas (bulan)	Dinas Pariwisata	12 bulan	8.419.000	APBD		12 bulan	9.300.000
3	02	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dinas (media cetak)	Dinas Pariwisata	3 media cetak	13.048.920	APBD		3 media cetak	14.400.000
3	02	01	16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan bahan logistik penunjang kegiatan dinas (bulan)	Dinas Pariwisata	12 bulan	15.547.200	APBD		12 bulan	17.100.000
3	02	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pemenuhan kebutuhan makan minum rapat dan tamu (bulan)	Dinas Pariwisata	12 bulan	47.200.000	APBD		12 bulan	24.400.000
3	02	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah (orang/hari)	Luar Kota Batu	300 orang/hari	152.758.000	APBD		300 orang/hari	110.000.000
3	02	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pegawai yang mendapat fasilitas komputer yang layak (%)		46%	433.475.000			51%	309.200.000
					Persentase aset penunjang kinerja aparatur yang layak (%)		N/A				N/A	
3	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang disediakan (unit)	Dinas Pariwisata	15 unit	137.211.000	APBD		8 unit	65.800.000
3	02	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara (unit)	Dinas Pariwisata	1 unit	56.800.000	APBD		1 unit	62.500.000

3	02	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara (unit)	Dinas Pariwisata	14 unit	189.464.000	APBD		14 unit	125.900.000
3	02	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi (unit)	Gedung Area Landing Paralayang	1 unit	50.000.000	APBD		1 unit	55.000.000
3	02	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase kehadiran pegawai (%)		100%	27.500.000				
3	02	03	05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Persentase pegawai dengan atribut yang layak	Dinas Pariwisata	1	27.500.000	APBD		-	-
3	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah aparatur dinas yang mendapat sertifikat (orang)		5 orang	15.500.000				44.600.000
3	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah fasilitasi peningkatan kapasitas pegawai dinas (orang/hari)	Dinas Pariwisata	100 orang/hari	15.500.000	APBD		405 orang/hari	44.600.000
3	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan pelaporan dinas (%)		100%	15.000.000				
3	02	06	05	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD	Jumlah dokumen Renstra yang terbentuk (dokumen)	Dinas Pariwisata	1 dokumen	15.000.000	APBD		-	-
3	02	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Cakupan wilayah pemasaran wisatawan nusantara (wilayah)		3 wilayah	3.769.766.500				266.000.000
					Jumlah event tematik agenda tahunan (event)		3 event					
3	02	15	05	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam dan Di Luar Negeri	Jumlah event wisata yang diikuti dan dilaksanakan (event)	Dalam dan luar Kota Batu	3 event	1.007.925.000	APBD		-	-
3	02	15	09	Promosi Pariwisata Kota Batu	Jumlah jenis media promosi pariwisata (media)	Kota Batu	6 media	1.528.546.000	APBD		-	-
3	02	15	10	Promosi Pariwisata Agenda Tahunan	Jumlah event wisata yang diikuti dan dilaksanakan (event)	Kota Batu	3 event	1.117.295.500	APBD		-	-
3	02	15	xx	Pengembangan informasi dan analisa pasar pariwisata	Jumlah lembaga yang terhubung dalam Sistem Informasi Pariwisata (lembaga)	Kota Batu	5 lembaga	116.000.000	APBD		20 lembaga	266.000.000
3	02	16		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase pengembangan sarana prasarana penunjang daya tarik desa wisata maju (%)		1%	1.167.866.800				2.110.000.000
					Persentase usaha jasa yang tersertifikasi (%)		16%					
3	02	16	01	Pengembangan Objek Pariwisata	Jumlah DTW yang difasilitasi dalam	Luar Kota	3 DTW	54.680.000	APBD		-	-

				Unggulan	Anugrah Wisata Jawa Timur (DTW)	Batu						
3	02	16	04	Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Objek Pariwisata Dengan Lembaga/Dunia Usaha	Jumlah usaha pariwisata yang difasilitasi dalam ajang penghargaan (usaha jasa)	Kota Batu	1 usaha pariwisata	86.025.000	APBD		-	-
3	02	16	05	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pemasaran Pariwisata	Persentase Desa wisata yang memiliki dokumen kajian perencanaan dan pengembangan desa wisata (%)	Kota Batu	29%	530.000.000	APBD		-	-
3	02	16	07	Pengembangan, Sosialisasi, dan Penerapan Swera Pengawasan Standarisasi	Jumlah peserta pembinaan teknis usaha jasa pariwisata (usaha jasa)	Kota Batu	800 orang	312.161.800	APBD		-	-
3	02	16	xx	Pengembangan Objek & Daya Tarik Pariwisata	Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terbangun (unit)	Kota Batu	0 unit	185.000.000	APBD		2 unit	2.110.000.000
					Jumlah sarana prasarana penunjang daya tarik wisata yang terpelihara (unit)		7 unit				6 unit	
3	02	17		Program Pengembangan Kemitraan	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi (orang)		60 orang	1.651.398.000	APBD			
					Jumlah kelompok pengelola desa wisata maju (kelompok)		1 kelompok					
3	02	17	03	Pengembangan SDM Di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bekerjasama Dengan Lembaga Lainnya	Jumlah peserta pembinaan teknis kompetensi profesi SDM pariwisata (orang)	Kota Batu	60 orang	200.575.000	APBD		-	-
					Jumlah jenis kompetensi profesi yang mendapat pembinaan (SKKNI)		3 SKKNI					
3	02	17	04	Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya	Jumlah lembaga pariwisata yang mendapat pembinaan (lembaga)	Kota Batu	1 lembaga	212.636.000	APBD		-	-
3	02	17	07	Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata	Jumlah peserta bimtek pengelolaan desa wisata (orang)	Kota Batu	370 orang	1.238.187.000	APBD		-	-
				JUMLAH				11.555.225.000				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata tahun 2018 merupakan pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk satu tahun kedepan. Rencana Kerja ini adalah salah satu pedoman yang akan dipakai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Batu.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini harus tunduk kepada kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan diperlukan peran serta secara aktif seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), masyarakat dan penyelenggara pemerintah terutama segenap aparatur Dinas Pariwisata Kota Batu. Diperlukan rencana tindak lanjut untuk mengimplementasikan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalam Renja 2018.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Oleh karena itu tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dapat berjalan secara optimal. Apabila dalam periode pelaksanaan Rencana Kerja ini dihadapkan pada hal-hal yang membuat Rencana Kerja tidak dapat dilaksanakan maka ditinjau kembali untuk dilakukan revisi sesuai dengan situasi dan kondisi.

Beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian :

1. Ketersediaan Dokumen Kriteria Desa Wisata.

Dokumen ini akan dijadikan dasar dalam standarisasi Desa Wisata yang *sustainable* dan sebagai alat untuk mengukur, memonitoring, dan mengevaluasi perkembangan Desa Wisata. Pengukuran indikator sasaran “Persentase perkembangan desa wisata berkategori desa wisata maju” sangat bergantung pada ketersediaan dokumen ini.

2. Ketersediaan Dokumen Analisa Pemasaran Pariwisata

Dokumen ini akan dijadikan dasar dalam menetapkan strategi pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien untuk tahun berikutnya. Dokumen ini sangat penting untuk mengembangkan paket wisata, target lokasi pemasaran yang potensial, hingga sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan pariwisata. Selain itu, perhitungan indikator sasaran Dinas Pariwisata “Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan” diharapkan dapat terpenuhi melalui ketersediaan dokumen ini.

3. Terbentuknya Sistem Informasi Pariwisata

Ketersediaan informasi yang akurat sangat vital dalam pengembangan pariwisata di Kota Batu. Hal tersebut tidak lepas dari dukungan stakeholder pariwisata yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata. Melalui integrasi data dengan stakeholder pariwisata melalui pembentukan Sistem Informasi Pariwisata, diharapkan agar kebijakan pembangunan di bidang pariwisata dapat tepat sasaran.

4. Tersusunnya Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan.

Kendala yang selama ini dihadapi oleh pemerintah adalah belum terdapat peraturan perundangundangan yang memadai sebagai pedoman dalam Pemajuan Kebudayaan Nasional

Indonesia secara menyeluruh dan terpadu. Padahal, Kebudayaan sebagai ciri khas suatu daerah, menjadi daya tarik pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan.

Untuk itu, sesuai dengan amanat UU No 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan tanggal 24 Mei 2017, maka Dinas Pariwisata mengadakan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagai langkah awal dari strategi pemajuan Kebudayaan Nasional dan sebagai dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, serta Perancangan Kerja Pembangunan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Batu Tahun 2018 ini dibuat, semoga dapat tercapai dan bermanfaat.

Batu, 3 September 2018
Plt. Kepala Dinas Pariwisata
Kota Batu



Drs. IMAM SURYONO, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630928 199503 1 001